



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-



undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh M DANANG HARI SUSENO, SAG MH yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

D. Isu Strategis

E. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan



demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten



Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing
- b. MISI 5 : Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 sebanyak empat sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas



Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	47,60	50,10	53,10	56,10	60.10
		Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	71,17	72,17	73,17	74,17	75.17
2	Menurunnya Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Terwujudnya Kabupaten layak Anak	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Pratama Kategori	Pratama Kategori	Pratama Kategori	Madya Kategori	Madya Kategori
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50.2	51.2	52.2	53.2	54.2

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten



Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempu-an Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempu-an Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satunya dengan program Keluarga Berencana, yang berarti kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur harus di tingkatkan.	Peserta KB pasangan usia subur di bagi Pasangan usia subur x 100	Peserta KB pasangan usia subur adalah Jumlah pasangan yang memakai atau menggunakan alat kontrasepsi aktif.Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri sampai dengan batas umur 50 tahun.100 adalah pengali dengan



						persentase.
2	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	Dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk Angka pemakaian kontrasepsi moder yang di sebut Modern Contraceptive Prevalance Rata (CPR)di gunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi modern.	Jumlah Perempuan yang menggunakan Kontrasepsi Modern di bagi Jumlah Perempuan Usia Reproduksi kali 100	Jumlah Perempuan yang menggunakan metode kontrasepsi modern yaitu tubektomi (MOW), implan, ayudi, suntik, pil, jumlah perempuan usia subur adalah perempuan yang sudah menikah mulai dari awal menikah sampai dengan usia 50 tahun.
3	Terwujudnya Kabupaten layak Anak	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Untuk pencapaian Kabupaten Layak Anak di lakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.	score hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkatan kretaria pada Pencapaian KLA adalah Prtama (600 point), Madya (700 point), Nindya(800 point), dan Utama(900 point)
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	IDG Adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur	Hasil data yang dirilis BPS	



				terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.		
--	--	--	--	---	--	--

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	60.10
2	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	75.17
3	Terwujudnya Kabupaten layak Anak	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Madya Kategori
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54.2

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan
reviu Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan
pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	47,60	50,10	53,10	56,10	60.10
		Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	71,17	72,17	73,17	74,17	75.17
2	Menurunnya Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Terwujudnya Kabupaten layak Anak	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama Kategori	Pratama Kategori	Pratama Kategori	Madya Kategori	Madya Kategori
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50.2	51.2	52.2	53.2	54.2



B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satunya dengan program Keluarga Berencana, yang berarti kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur harus di tingkatkan.	Peserta KB pasangan usia subur di bagi Pasangan usia subur x 100		Peserta KB pasangan usia subur adalah Jumlah pasangan yang memakai atau menggunakan alat kontrasepsi aktif. Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri sampai dengan batas umur 50 tahun. 100 adalah pengali dengan persentase.
2	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	Dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk Angka pemakaian kontrasepsi moder yang di sebut Modern Contraceptive Prevalance Rata (CPR) di gunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi modern.	Jumlah Perempuan yang menggunakan Kontrasepsi Modern di bagi Jumlah Perempuan Usia Reproduksi kali 100		Jumlah Perempuan yang menggunakan metode kontrasepsi modern yaitu tubektomi (MOW), implan, ayudi, suntik, pil, jumlah perempuan usia subur adalah perempuan yang sudah menikah mulai dari awal menikah sampai dengan usia 50 tahun.



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

3	Terwujudnya Kabupaten layak Anak	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Untuk pencapaian Kabupaten Layak Anak di lakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.	score hasil penilaian Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkatan ketertara pada Pencapaian KLA adalah Pertama (600 point), Madya (700 point), Nindya(800 point), dan Utama(900 point)
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	IDG Adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraangenderberdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	Hasil data yang dirilis BPS	



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	60.10
2	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	75.17
3	Terwujudnya Kabupaten layak Anak	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya Kategori
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	54.2



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,



cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian



Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal dan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 476/06/KPTS/III.07/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat



Tahun 2022

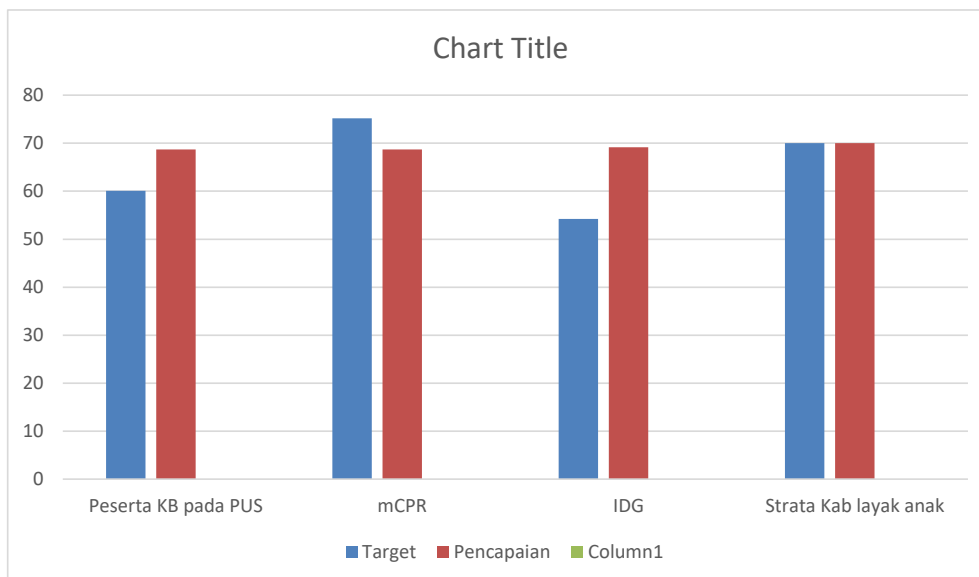
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	60.10	68.7	114.31
2	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	75.17	68.7	91.39
3	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya Kategori	madya	100.00
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	54.2	69.14	127.56

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur, dengan capaian kinerja 114.31 %, pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dengan capaian kinerja 127.56 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Strata/status Kabupaten Layak Anak, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR), dengan capaian kinerja 91.39 %.



C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 8 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dari sebanyak 8 sasaran strategis dengan sebanyak 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	60.10	68.7	114.31
2	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	75.17	68.7	91.39
3	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya Kategori	madya	100.00
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	54.2	69.14	127.56

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	25.00 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 8 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00
2	Misi 2	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00
	Jumlah	4	2	50.00	1	25.00	1	25.00

Dari sebanyak 8 sasaran dengan sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	50.00 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 8 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	47,60	73,8	155,04	50,10	74,09	147,00	53,10	93,86	220,00	56,10	99,86	178,00	60,10	68,7	114,31

Sasaran Meningkatkan kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur" adalah sebesar 68.7 dari target sebesar 60.10 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114.31 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur" tahun ini menurun 63.69 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 178.00

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur" tahun ini adalah sebesar 114.31 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 114.31 %.

Penghitungan sasaran 1 meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur menggunakan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{seluruh peserta KB}}{\sum \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100 \%$$



Dengan pencapaian Indikator sasaran sebagai berikut :

$$= \frac{32.705}{47.596} \times 100 \% = 68.7\%$$

Tabel 3.7

Data dukung Capaian Indikator Sasaran

No	Variabel	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Peserta KB Pus	57.075	58.627	81.763	69.078	32.705
2	Pasangan usia subur	77.290	79,124	87.111	93.824	47.596





Sasaran 2

Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	71,17	73,8	155,04	72,17	74,09	102,61	73,17	74,4	101,00	74,17	75,4	101,00	75,17	68,7	91,39

Sasaran Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)" adalah sebesar 68.7 dari target sebesar 75.17 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 91.39 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)" tahun ini menurun 9.61 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.00

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)" tahun ini adalah sebesar 91.39 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kerjanya mencapai 91.39 %.



Sasaran 3

Terwujudnya Kabupaten layak Anak

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Terwujudnya Kabupaten layak Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Prata ma Kategori	-	12.00	Prata ma Kategori	-	74.00	Prata ma Kategori	0	0.00	Madya kategori	prata ma kategori	85.00	Madya Kategori	madya	100.00

Sasaran Terwujudnya Kabupaten layak Anak dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Strata/status Kabupaten Layak Anak" adalah sebesar madya dari target sebesar Madya Kategori yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Strata/status Kabupaten Layak Anak" tahun ini meningkat 15.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 85.00

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Strata/status Kabupaten Layak Anak" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kerjanya mencapai 100 %.



Sasaran 4

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50.2	63.84	127.17	51.2	63.84	124.68	52.2	68,21	130.00	53.2	69.14	129.00	54.2	69.14	127.56

Sasaran Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" adalah sebesar 69.14 dari target sebesar 54.2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 127.56 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" tahun ini menurun 1.44 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 129.00

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" tahun ini adalah sebesar 127.56 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kerjanya mencapai 127.56 %.

**PENCAPAIAN SASARAN RPJMD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 3 Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Menurunnya Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan



3. Meningkatkan Kesetaraan Gender

Analisa Sasaran RPJMD Meningkatnya Kesetaraan Gender

Pencapaian Sasaran ini dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel 3.11
Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,96	0,93
		TFR	2,26	2,48
2	Menurunnya Kasus Kekerasan pada Anak dan perempuan	Persentase Kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang ditangani	100%	100%
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	91,8	93
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,2 Point	69.14 Point

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran RPJMD Terkendalinya Laju Pertumbuhan penduduk

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi	Realisasi
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.96	0,93	103,22%
		TFR	2,26	2,48	91%

Sasaran terkendalinya penduduk terdapat 2 indikator sasaran yaitu laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran yang pengukurannya dilakukan oleh BKKBN bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik.

Pada tabel 3.11 menunjukkan realisasi angka laju pertumbuhan sebesar 0,93 dari target 0,96 dengan pencapaian target 103,22%. Hal ini menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lampung Barat terkendali



Sedangkan Indikator kedua yaitu Total Fertility Rate realisasi 2,26 dari target 2,48 pencapaian kinerja untuk indicator ini sebesar 91%. Total Fertility Rate adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur, dengan TFR 2,48 ini berarti setiap jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur lebih dari 2 orang.

Total fertility rate menggambarkan riwayat fertilitas dari sejumlah perempuan hipotesis selama reproduksinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor demografi dan faktor non demografi. Faktor non demografi diantaranya adalah struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas dan proporsi yang kawin. Sedangkan faktor non demografi antara lain, keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, dan urbanisasi dan industrialisasi. Variabel-variabel di atas dapat mempengaruhi secara langsung terhadap fertilitas.

Tabel 3.14
**PERBANDINGAN PENCAPAIAN SASARAN RPJMD TERKENDALINYA
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2019-2020**

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.02	0.96	0,93	0.93
		TFR	2.27	2,26	2,39	2.48

Dari tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lampung Barat tidak menunjukkan penurunan dari 0.96 % di tahun 2021 menjadi 0,93% di tahun 2022. Sedangkan untuk angka TFR tetap menunjukkan adanya peningkatan dari 2,39 menjadi 2,48, hal ini terjadi karena ada beberapa kemungkinan :

1. Drop out peserta KB Aktif yang tinggi
2. Meningkatnya angka Unmet need KB
3. Meningkatnya ASFR 15-19 th

Namun demikian pencapaian kedua indicator RPJMD Lampung Barat ini memperlihatkan bahwa peningkatan TFR di Kabupaten Lampung Barat tidak terlalu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Barat



Tabel 3.15
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN MENURUNNYA KASUS KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian
1	Menurunnya Kasus Kekerasan pada Anak dan perempuan	Persentase Kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang ditangani	100%	100%

Sasaran menurunnya kekerasan pada perempuan dan anak dengan 1 indikator persentase kasus Kekerasan pada anak dan perempuan yang ditangani diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Kasus Kekerasan yang ditangani}}{\sum \text{Kasus Kekerasan}} \times 100\%$$

Dengan pencapaian Indikator sasaran sebagai berikut : Jumlah kasus anak dan perempuan yang dilaporkan 10 kasus terdiri dari 3 kasus perempuan yang mengalami kasus kekerasan dan 7 kasus anak

$$= \frac{10 \text{ Kasus}}{10 \text{ Kasus}} \times 100 = 100\%$$

Pada tabel 3.17 menunjukkan realisasi indikator 100% dari target yang ditetapkan . Hal ini menunjukkan bahwa semua kasus Kekerasan yang dilaporkan ke Pemerintah Lampung Barat semuanya dapat ditangani dan diselesaikan.

Yang menjadi kendala pada sasaran ini adalah tidak semua kasus dilaporkan, disebabkan adanya anggapan aib keluarga . Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, advokasi , pembentukan satgas PPA disetiap kecamatan dan pekon seluruh Lampung Barat, dan pada tahun 2022 ini membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di 2 desa.

Tabel 3.16
REALISASI PENCAPAIAN SASARAN MENURUNNYA KASUS KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN TAHUN 2021-2022

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1	Menurunnya Kasus Kekerasan pada Anak dan	Persentase Kasus kekerasan pada anak dan	100%	100%	100%	100%



	perempuan	perempuan yang ditangani				
--	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 100% artinya setiap kasus yang dilaporkan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu ditangani.

Tabel 3.17
**PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS RPJMD
MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER
TAHUN 2022**

Pencapaian sasaran ini dapat terlihat dari tabel dibawah ini

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD Tahun 2022	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	91,8	93	1001,3
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,2 Point	69,14Point	127,56

Sasaran meningkatnya kesetaraan gender terdapat 2 indikator sasaran , yaitu indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang pengukurannya dilakukan oleh Biro Pusat Statistik.

Indeks pembangunan gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi variable yang sama seperti IPM , tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan kondisi baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak ada pembakuan peran, beban ganda, sub ordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya adalah indeks Pembangunan Gender (IPG). Dengan kata lain IPG ini merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender.



Pada tabel 3.15 Menunjukkan Realisasi IPG Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 93 Ketimpangan gender yang terjadi di kabupaten Lampung Barat pada tahun sebelumnya tampak pada pengeluaran perkapita disesuaikan. Sedangkan pada angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah hampir terjadi persamaan gender.

Pada tabel 3.15 Menunjukkan Realisasi IDG ,Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 mencapai 69.14 point. Indeks ini menunjukkan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dengan pencapaiann melebihi terhadap target yaitu sebesar 127,56%.

Pencapaian kedua indicator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat telah memperhatikan pemabangunan dengan pengarusutamaan gender.

Tabel 3.18
**PERBANDINGAN REALISASI SASARAN MENINGKATNYA KESETARAAN
GENDER TAHUN 2019 DAN 2020**

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	91,74	91,8	92,95	93
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,2 point	54,2Point	68,24 point	69,14 Point

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan nilai IDG , hal ini menunjukkan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, dan penurunan nilai IPG yang berarti ketimpangan gender yang terjadi semakin menurun.

E, Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.19
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALIASI KEUANGAN	
				Rp	%
1	Meningkatnya Kesertaan ber KB bagi PUS	Program Keluarga Berencana	3.129.778.800	3.066.324.679	98
		Program Pengendalian Penduduk	193.284.000	191.553.855	99
2	Meningkatnya Prevalensi	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga	3.303.072.100	2.413.396.937	73



	Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate mCPR)	Sejahtera (KS)			
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	194.349.000	193.289.820	99
		Program Perlindungan Perempuan	177.993.500	116.887.000	66
		Program Perlindungan Khusus Anak	465.677.000	336.374.000	72
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	482.909.000	444.176.500	92
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	120.381.000	107.388.000	89
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	43.690.000	43.537.500	100

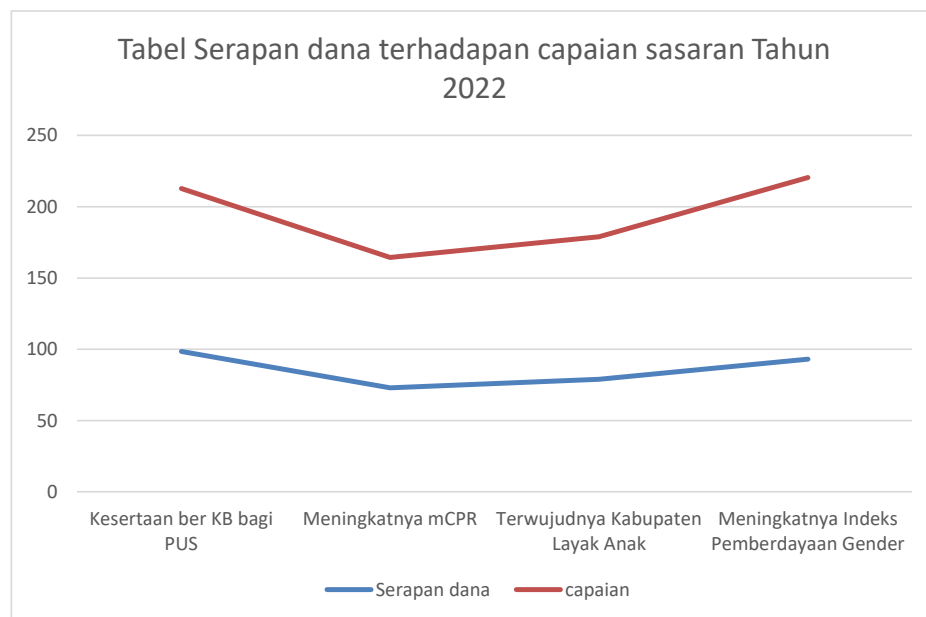
Tabel 3.20
CAPAIAN KINERJA, PENYERAPAN ANGGARAN DAN TINGKAT EFISIENSI

Periode 2018 - 2022 Tahun 2022														
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan							
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%				
1	Meningkatnya kesetiaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	1.1 Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	60,10	68,7	114,31	1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	193.284.000	191.553.355	99,10				
							2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.129.778.800	3.096.324.679	97,97				
							3 PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.427.712.810	3.338.540.837	97,40				
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			114,31	TOTAL PER SASARAN	6.760.775.410	6.596.418.671	97,71
TINGKAT EFISIENSI 16,60 %														
TINGKAT EFEKTIFITAS 116,98 %														
2	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	2.1 Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	75,17	68,7	91,39	4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.303.072.100	2.413.396.937	73,07				
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			91,39	TOTAL PER SASARAN	3.303.072.100	2.413.396.937	73,07
							TINGKAT EFISIENSI 20,08 %							
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	3.1 Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	madya	100,00	5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	194.349.000	193.289.820	99,46				
							6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	465.677.000	334.199.288	71,77				
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100,00	TOTAL PER SASARAN	660.028.000	527.488.108	79,92
							TINGKAT EFISIENSI 20,08 %							



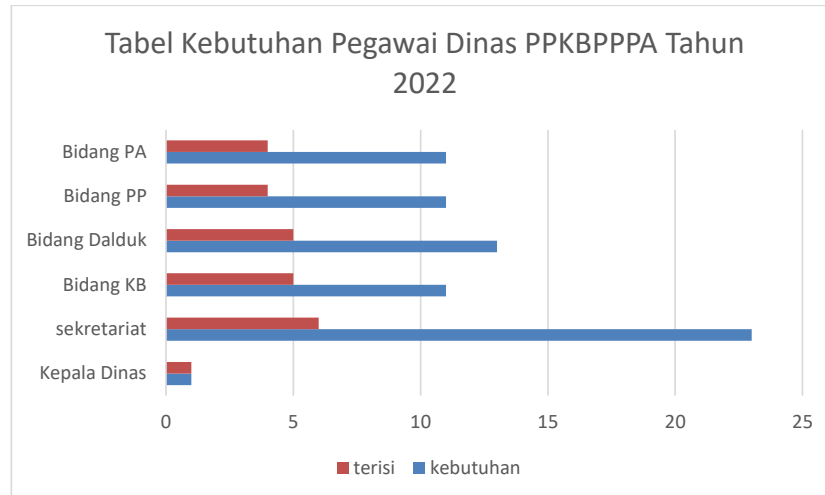
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	4.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	54.2	69.14	127.56	7	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	482.909.000	482.667.000	99.65	
								8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	177.993.500	114.987.000	64.60	
								9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	120.381.000	107.388.000	89.21	
								10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	43.690.000	43.537.500	99.65	
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				127.56	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 36.82 %													
TINGKAT EFEKTIVITAS 140.88 %													
										TOTAL KESELURUHAN	11.538.847.010	10.285.884.216	89.14

Berdasarkan tabel diatas Dinas PPKB PPPA Kabupaten Lampung Barat sepanjang tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indicator rata-rata 78.8% dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran .



F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Gambar 4



Berdasarkan pada gambar 4 terlihat bahwa kinerja 49 pegawai sesuai jumlah kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak bisa ditangani oleh 28 orang . Hal ini menyebabkan beberapa pegawai memiliki beban kerja yang besar (tugas tambahan)

A. DATA DUKUNG PENCAPAIAN SASARAN

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam mencapai sasaran strategisnya didukung dengan 6 enam program , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
TARGET DAN REALISASI PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Indikator	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kesertaan ber KB bagi PUS	Program Keluarga Berencana	persentase peserta KB Aktif	76 %	68,7%
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU	persentase peserta KB Akti	76 %	68,7%
2	Meningkatnya	Program pembinaan	Presentase pemakaian	72,17 %	68,7%



	Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate mCPR)	Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri dalam MKJP	kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR)		
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR)	72,17 %	74,4%
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Strata Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama	Kategori Pratama	0 kategori
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender dikenal dengan IDG	52 Point	68,21



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114.31 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 91.39 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 127.56 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.686.972.803 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.571.762.909, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 4.115.209.894

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114.31 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 91.39 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 127.56 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 15.686.972.803 (lima belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat adalah 73.77 % dari anggaran yang direncanakan, hal



tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat,

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



M DANANG HARI SUSENO, SAG MH

NIP197011212000031003